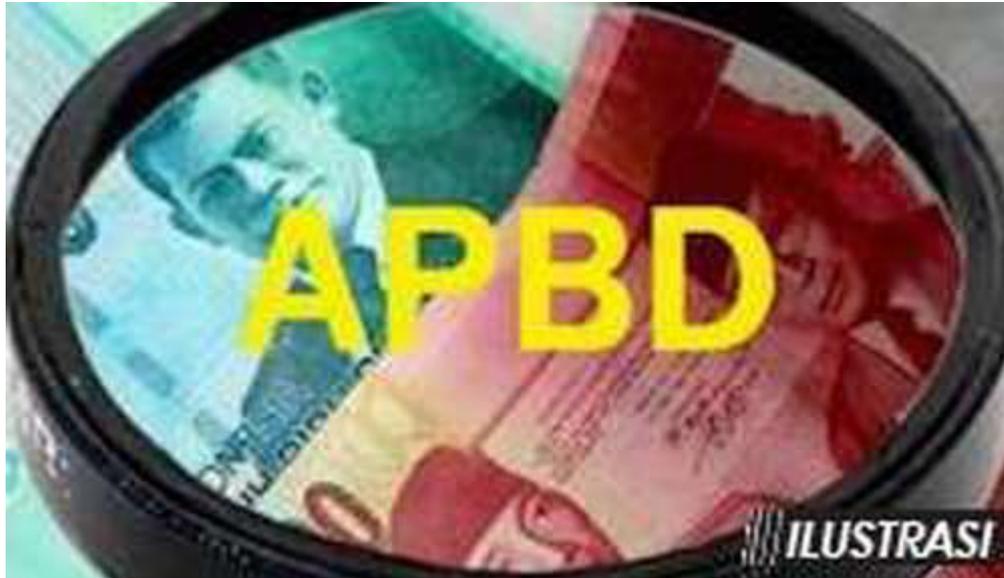


**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA  
TINDAKLANJUTI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN**



*Sumber: jpnn.com*

Kisaran, (Analisa)

Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara, dari Daerah Pemilihan VI meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, Selasa (23/6).

Dari tindak lanjut itu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin Drs. H. Bustami HS. mempertanyakan penerimaan dana bagi hasil (DBH) dan dana lainnya yang diterima Pemkab. Asahan.

‘Kami ingin mengecek persoalan penyaluran dana Provinsi ke Kabupaten Asahan, pasalnya masih ada sedikit persoalan keuangan Provinsi dengan Pemkab. Asahan,’ ungkap Bustami kepada wartawan usai pertemuan.

Mantan Ketua DPRD Asahan itu meminta kepada Pemkab. Asahan untuk dapat bekerja sama dengan anggota dewan dari Dapil V untuk kepentingan masyarakat Asahan. Apalagi pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki utang dengan Pemkab. Asahan.

Karena itu, dia mengharapkan Pemkab. Asahan untuk dapat memberikan informasi yang benar, agar segala persoalan Asahan dengan pihak Provinsi dapat diselesaikan.

**Sambut Baik**

Kunjungan mereka diterima Wakil Bupati Asahan, H. Surya dan menyambut baik kunjungan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Asahan. Apalagi anggota

Dewan dari Dapil V ini siap membantu persoalan yang dihadapi pemerintah , mulai dari persoalan keuangan, pembangunan, hingga kebutuhan masyarakat.

Surya berjanji akan memberikan data yang lengkap kepada DPRD Sumut terkait dana bagi hasil, bantuan keuangan provinsi, serta harga eceran tertinggi elpiji 3 kilogram.

Anggota DPRD Sumut yang berkunjung, terdiri dari Bustami (PPP), Syamsul Qodri Marpaung (PKS), Mustofawiyah (Demokrat), Syamsul Bahri Batu Bara (Golkar), Zahri (PDI-P), Helmiati (Golkar), Sri Kumala (Gerindra), Eben Ezer Sitorus (Hanura), dan Budiman Nadapdap (PDI-P).

### **Sumber Berita:**

1. Harian Analisa, Anggota DPRD Sumut Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK.
2. [www.jariungu.com](http://www.jariungu.com), Anggota DPRD Sumut Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK, Jumat, 26 Juni 2015.
3. [Hariansib.co](http://Hariansib.co), DPRDSU akan tindaklanjuti Temuan BPK Terhadap LKPD Provsu, Senin, 15 Juni 2015
4. [Prorakyat.co.id](http://Prorakyat.co.id), Banggar DPRDSU Tindaklanjuti Temuan BPK atas 18 Proyek Pemprovsu Bermasalah, Jumat, 19 Juni 2015.

### **Catatan:**

- Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 1 angka 9 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pendanaan Desentralisasi.
- Pasal 11 UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam.
  1. Pajak, terdiri dari:
    - Pajak Bumi dan Bangunan;
    - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
    - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
  2. Sumber Daya Alam, yang berasal dari:
    - Kehutanan;
    - Pertambangan Umum;
    - Perikanan;

- Pertambangan Minyak Bumi;
  - Pertambangan Gas Bumi;
  - Pertambangan Panas Bumi.
- Pasal 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.